

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan penulis pada BAB III kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Jumlah satker yang menggunakan KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang relatif rendah yaitu, 54 satker atau 33,54% pada tahun 2020 dan 51 satker atau 31,67% pada tahun 2021. Berikut adalah hal-hal yang melatarbelakangi sedikitnya pengguna KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang :
 - a. Satker merasa belum ada urgensi untuk menggunakan KKP;
 - b. Satker memiliki jenis pagu belanja yang dibayar melalui UP tidak lebih dari Rp2.400.000.000,00 (alasan ini dapat diterima karena sesuai dengan ketentuan PMK No. 178/PMK.05/2018);
 - c. Satker masih menggunakan bank lokal;
 - d. Bendahara memiliki cukup banyak pekerjaan lain yang perlu diselesaikan sehingga belum mendapat waktu untuk melakukan pengurusan pembuatan KKP;
 - e. Terdapat beberapa mekanisme yang dirasa menyulitkan seperti, tagihan KKP baru bisa di bayar saat jatuh tempo dan bendahara harus meminta bukti pajak ke pihak rekanan untuk lampiran di laporan pertanggungjawaban;

- f. Sedikitnya toko yang memiliki mesin *Electronic Data Capture* (EDC);
 - g. Tidak semua pemilik toko memiliki NPWP.
2. Proporsi penggunaan UP yang seharusnya 60% untuk UP tunai dan 40% untuk UP KKP, rata-rata realisasi penggunaan UP di wilayah pembayaran KPPN Malang belum mencapai proporsi yang ideal. Dengan proporsi pada tahun 2020 91,26% : 8,74% dan pada tahun 2021 92,07 : 7,93%. Sehingga, dengan adanya penggunaan KKP penyerapan anggaran belanja satker belum efektif.
 3. Dengan adanya PMK No. 97/PMK.05/2021 pengelolaan UP menggunakan KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang belum berdampak.
 4. Pada wilayah pembayaran KPPN Malang satker yang menggunakan KKP memiliki kinerja IKPA UP yang lebih baik daripada satker yang tidak menggunakan KKP. Rata-rata nilai IKPA UP satker yang tidak menggunakan KKP pada tahun 2020 sebesar 77,65 dan 93,64 serta pada tahun 2021 sebesar 85,35 dan 93,54.
 5. Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam penggunaan KKP di wilayah pembayaran KPPN Malang, saran penulis adalah perlu dibuatnya sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan dalam hal pembelian dan pembayaran.